

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN E-BOOK

- Achmad Romsan, Istilah Dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR, 2003M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012.
- Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century", *International Affairs*, Vol.67, No.3, 1991Munir, Migrasi- Dasar-dasar Demografi edisi 2000, Lembaga Penerbit UI, Jakarta, 2000.
- Buku Petunjuk Teknis Bagi Petugas; Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia; International Organization for Migration (IOM), 2009.
- Friedrich Heckmann, "Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany", *International Migration Review*, Vol. 38, No. 3, *Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration*, Fall, 2004.
- IOM dan Instansi terkait, *Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)*, Penerbit IOM: Jakarta, 2012.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005
- Kadarudin, *People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter" Volume XII Nomor 2 Edisi Juni 2013
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Transnational Organized Crime Membayangi*, Buletin Berkala LPSK Edisi No. III, 2012

- Martin, Philips & Mark Miller (2000); *Smuggling and Trafficking: A Conference Report International Migration Review*, Vol. 34, No. 3 (Autumn, 2000).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Masalah Pertahanan Negara DMC Indonesia, Pertahanan Nirmiliter Upaya Mobilisasi Kekuatan Non-Militer, Sayidiman Suryohadiprojo, Si vis Pacem Para Bellum : Membangun Pertahanan yang Modern dan Efektif*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Sudarto, *Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana dengan dibentuknya suatu peraturan yang dimana perbuatan tadi dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana*, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 2009
- Sam Fernando, *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*, Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya. 2013
- Theodore A. Colombus, 1990, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, Bandung, Cv Abardin, 2001.

JURNAL

- Kadarudin, *People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer “Jupiter” Volume XII Nomor 2 Edisi Juni (2013).
- M. Fitzmaurice, *Law Of Treaties, Section A: Introduction to The Law of Treaties*, University Of London
- Ralf Emmers, 2002, *The United Nation (UN) defines transnational crime, “As offences whose inception, prevention and/or direct or indirect involved more than one country”*. Working Paper No. 39, Institute of Strategic Studies Singapore.

PERATURAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Konvensi Preserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*)

Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*)

Konvensi Palermo Tahun 2000 Tentang Kejahatan Terorganisir

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 1966.

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi PBB Organisasi Menentang Kejahatan Transnasional (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*).

Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi Preserikatan Bangsa-Bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

WEBSITE

Department of Immigration and Border Protection, Privacy Notice, <https://www.immi.gov.au/allforms/foreign/1442iind.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, <https://media.neliti.com/media/publications/40563-ID-keberadaan-asas-pacta-sunt-servanda-dalam-perjanjian-internasional.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Isharyanto Ciptowiyono, Globalisasi dan Kejahatan Transnasional, <https://www.kompasiana.com/isharyanto/552b6a4a6ea8342f418b4577/globalisasi-dan-kejahatan-transnasional>, diakses pada tanggal 26 Mei 2019.

Ni Kumara Santi Dewi, "Bahas Dampak Kebijakan Suaka Australia, Menlu Temui UNHCR," <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/560337-bahas-dampak-kebijakan-suaka-australia--menlu-temui-unhcr> Diakses pada tanggal 9 Mei 2019

Rizky Armanda, 20 orang WNA Bangladesh dideportasi Rudenim Pekanbaru ke Jakarta, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/09/06/20-orang-wna-bangladesh-dideportasi-rudenim-pekanbaru-ke-jakarta?page=1>, diakses pada tanggal 6 juni 2019

Paul Sinlaeloe, Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, https://www.academia.edu/35306945/PERDAGANGAN_ORANG_and_PENYELUNDUPAN_MANUSIA, diakses pada tanggal 26 Mei 2019

Sayidin, *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing sebagai Transnational Organized Crimes*, https://www.academia.edu/11761942/ILLEGAL_UNREPORTED_AND_UNREGULATED_FISHING_SEBAGAI_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIMES, diakses pada tanggal 26 Mei 2019

Sukowati Utami, “Mendesak Beleid Penyeludupan Manusia”,
<http://majalahforum.com/fokus.php?tid=53>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2019

United Nations, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto
<http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>.Diakses pada tanggal 16 Januari 2019.

Viva News, "Indonesia Jadi Tempat Transit Penyelundupan manusia", Diakses Melalui
http://nasional.vivanews.com/news/read/53394-indonesia_jadi_tempat_transit_imigran_gelap, diakses pada tanggal 13 April 2019

Wahyu Dwi Anggoro, Ini alasan Australia menjadi tujuan pengungsi dunia,
<https://news.okezone.com/read/2013/06/24/411/826635/ini-alasan-australia-jadi-tujuan-pengungsi-dunia>, diakses pada tanggal 13 April 2019

.

DAFTAR TABEL

UNODC, Migrant Smuggling in Asia : Current Trend and Related Challenges, Bangkok, hlm. 260.

Arsip Laporan Tahunan Satgas Pusat People Smuggling Bareskrim Mabes Polri
2014